



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LKPK & LSKP

TRIWULAN I 2024
Kanwil DJPb Sumsel





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 2, Palembang 30129; TELEPON (0711) 356534, 353526; FAKSIMILI (0711) 310891; SUREL :
kanwildjpbnsmsel@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/smsel

NOTA DINAS
NOMOR [@NomorND]

Yth. : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Periode Triwulan I 2024
Tanggal : [@TanggalND]

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-298/PB.6/2024 tanggal 17 April 2024 hal Pentahapan Penyampaian LKPK-TW dan LSKP-TW Periode *Unaudited* 2023 dan Triwulan I Tahun 2024, dengan ini disampaikan Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Periode Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto



GOVERNMENT FINANCE STATISTICS Tiwulan I 2024

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

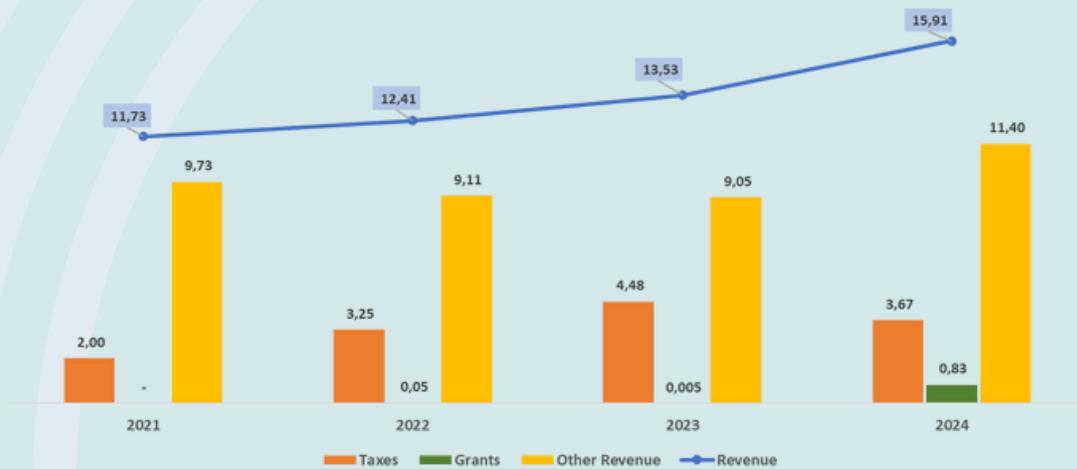
Laporan Operasional Statistik



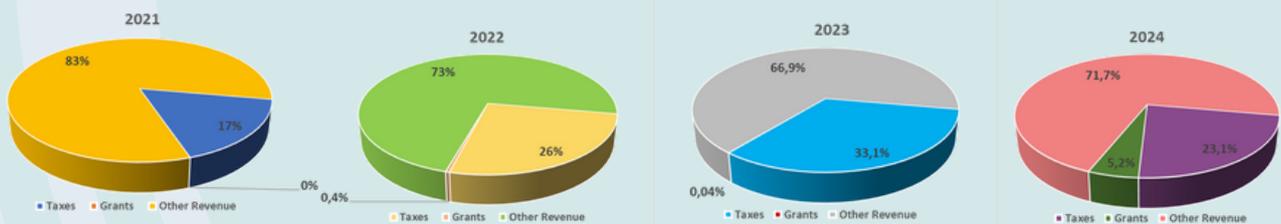
Laporan Operasional (LO) GFS merupakan ikhtisar transaksi Pemerintah Daerah pada periode pelaporan tertentu. LO GFS menyajikan detail transaksi pendapatan dan beban, investasi neto pada aset non keuangan, akuisisi neto aset keuangan dan jumlah neto kewajiban yang timbul

Tren Pendapatan LO Statistik

Perbandingan Pendapatan 2020-2023 (dalam triliun)



Persentase Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan 2021-2024



LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH



Beban LO Statistik

Total Expense
Rp7,71 Triliun



01 Pempus
Rp9,78 Triliun

02 Pemda
Rp3,35 Triliun

03 Eliminasi
Rp5,43 Triliun

Compensation of employees 3,58 T	↑ 16,4%
Use of goods and service 2,15 T	↑ 33%
Interest 5,09 M	↓ 56,7%
Subsidies 0,33 M	↓ 7,84
Grants 1,85 T	↓ 11,0
Social Benefit 1,69 M	↓ 46,3%
Other Expense 124,37 M	↓ 24,6%

Neraca Statistik



Neraca Statistik menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan netto pada akhir periode pelaporan

Financial Assets
Rp33,24 Triliun

Nonfinancial Assets
Rp300,63 Triliun



Liabilities
Rp4,46 Triliun

Net Worth
Rp329,41 Triliun

Perbandingan Komponen Neraca Statistik Tahun 2023 dan 2024 (dalam triliun)



Perbandingan Komponen Aset non Keuangan Tahun 2023 dan 2024 (dalam triliun)

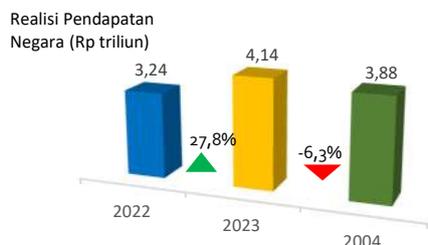


FLASH REPORT

A. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPKD-TW, LKPK-TW dan LSKP-TW Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2024

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP -TW)

Realisasi pendapatan negara wilayah Sumsel triwulan I 2024 mencapai Rp3,88 triliun. Berdasarkan jenisnya, Penerimaan Pajak menjadi kontributor terbesar atas capaian pendapatan negara wilayah Sumsel sampai dengan 31 Maret 2024, yaitu mencapai Rp3,1 triliun atau 79,8% dari total pendapatan negara. PNBP memberikan kontribusi sebesar Rp0,78 triliun atau 20,17%. Pendapatan triwulan I 2024 tumbuh negatif sebesar 6,5% dibanding periode sama tahun 2023.



Belanja Negara wilayah Sumsel sampai dengan 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp10,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3,74 triliun dan belanja transfer Rp6,65 triliun. Besaran realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 30,3% dibandingkan periode sama tahun 2023. Hal tersebut dikontribusi oleh Belanja Pemerintah Pusat 36,0% dan Transfer ke Daerah 64,0%.

Realisasi Per Jenis Belanja (Rp triliun)



APBN wilayah Sumatera Selatan menunjukkan angka defisit anggaran sebesar Rp6,5 triliun atau tumbuh negatif sebesar minus 70,1% (yoy).

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD -TW)

Kinerja APBD dari sisi pendapatan sampai dengan 31 Maret 2024 tumbuh positif sebesar 34,1% (yoy). Peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan transfer sebesar 62,6%, hal ini cukup untuk menopang turunnya kinerja dari sisi PAD, yang tumbuh negatif 42,5% . Pertumbuhan positif juga diikuti oleh kinerja APBD dari sisi belanja, yang tumbuh 6,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp miliar)

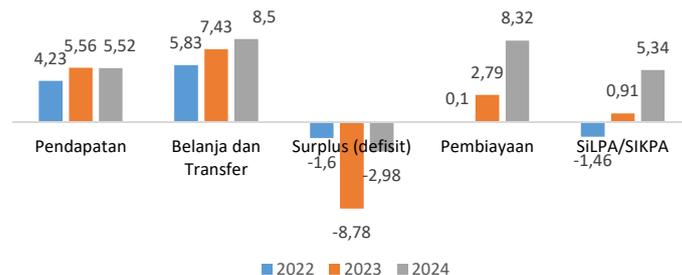
Uraian	2014	2023	%
Pendapatan Daerah	6.993,04	5.215,20	34,09%
PAD	808,94	1.406,62	-42,49%
Pendapatan Transfer	6.184,06	3.802,79	62,62%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,04	5,79	-99,29%
Belanja Daerah	3.463,12	3.265,01	6,07%
Belanja Operasi	2.728,29	2.878,82	-5,23%
Belanja Modal	184,13	163,94	12,32%
Belanja Tidak Terduga	2,03	0,89	128,77%
Belanja Transfer	548,67	221,37	147,85%
SURPLUS / DEFISIT Pembiayaan	3.529,92	1.950,18	81,00%
	8.327,88	2.794,70	197,99%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	11.857,80	4.744,88	149,91%

Masih terdapat surplus APBD sebesar Rp3,52 triliun atau tumbuh 81% (yoy). Surplus APBD lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, belum mencerminkan kinerja PAD yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih tergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi belanja operasionalnya

3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK -TW)

Kinerja Pendapatan Pemerintah Konsolidasian sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp5,52 triliun, tumbuh negatif Rp40,6 miliar atau -0,7% (yoy). Di sisi lain, kinerja Belanja Pemerintah Konsolidasian tumbuh positif sebesar Rp1.06 triliun atau 14,3%. Pemerintah Pusat berkontribusi utama baik dari sisi pendapatan maupun belanja yaitu 70% dan 59% dari total pendapatan dan belanja konsolidasian sampai dengan triwulan I 2024.

Laporan Keuangan Konsolidasian 2022-2024 Triwulan I (Rp triliun)





Defisit konsolidasian tercatat sebesar Rp2,98 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan negatif yang berarti celah defisit di lingkup konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 58,9% (yoy). Untuk menutup angka defisit tersebut, Pembiayaan Konsolidasian sampai dengan 31 Maret 2024 mencatatkan angka sebesar Rp8,32 triliun yang dalam hal ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 198% (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi naiknya penerimaan pembiayaan dari pemerintah daerah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 198% (yoy) seiring dengan penurunan pengeluaran pembiayaan di angka -87,00% (yoy).

4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP - TW)

Sampai dengan 31 Maret 2024 transaksi pendapatan pemerintah di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp15,91 triliun yang terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp3,67 triliun, pendapatan hibah sebesar Rp833,8 miliar dan pendapatan lainnya sebesar Rp11,40 triliun. Transaksi pendapatan tumbuh 17,6% dibanding tahun sebelumnya periode yang sama.

Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Bersih	2024	2023	%
Pendapatan	15,91	13,54	17,50%
Beban	7,71	6,95	10,94%
Saldo Operasi Neto	8,2	6,58	24,62%

Pada sisi beban, angka yang tercatat sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 10,90% (yoy), sehingga posisi saldo operasi neto di wilayah Sumatera Selatan sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp8,20 triliun.

Transaksi pendapatan dan beban mempengaruhi posisi kekayaan bersih pemerintah di wilayah Sumatera Selatan, posisi kekayaan bersih sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp.329,41 triliun.

Balance Sheet	2024	2023	%
Aset Non keuangan	300,63	305,47	-1,58%
Aset Keuangan	33,24	22,47	47,93%
Kewajiban	4,45	4,98	-10,64%
Net Worth	329,41	322,96	2,00%

Kekayaan bersih sampai dengan 31 Maret 2024 meningkat sebesar 2,0% dibanding tahun 2023. Kekayaan bersih terdiri dari aset non keuangan sebesar Rp300,63 triliun, aset keuangan sebesar Rp33,24 triliun dan kewajiban sebesar Rp4,45 triliun.

B. Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Rasio solvabilitas jangka pendek Pemerintah Konsolidasian wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai triwulan I 2024 adalah sebesar 774% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan kas lancar yang signifikan meskipun terdapat kenaikan kewajiban jangka pendek. Meskipun secara total nilai solvabilitas jangka pendek pemerintah konsolidasian memiliki nilai lebih dari 100%, akan tetapi untuk level pemerintah daerah masih terdapat pemerintah daerah dengan nilai rasio solvabilitas dibawah 100% yaitu Pemkab Empat Lawang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Pemkab Empat Lawang memiliki kewajiban jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan aset lancar.

Rasio solvabilitas jangka panjang Pemerintah Konsolidasian wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 19.766% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dalam kondisi. Kewajiban Jangka Panjang triwulan I tahun 2024 lingkup wilayah Sumatera Selatan terdapat pada Kab. OKU, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. OKU Sekatan, Kab. Ogan Ilir, Kota Palembang dan Lubuk Linggau. Rasio solvabilitas jangka panjang pada periode triwulan I tahun 2024 menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar yang sebesar 55.868%

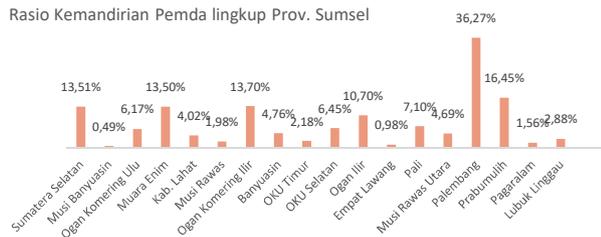
2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 11,45%, menurun dibanding periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 29,97%. Secara rata-rata rasio kemandirian keuangan tercatat pada kategori kurang (*range* 10%-20%) dan jika dilihat per pemda masing-masing, masih banyak pemda lingkup Sumatera Selatan yang kriteria kemandirian keuangan daerahnya masuk dalam kategori sangat kurang (*range* 0%-10%), yaitu



sebanyak dua belas pemda.

Rasio Kemandirian Pemda lingkup Prov. Sumsel



Terdapat satu pemda masuk ke dalam kategori cukup yaitu Kota Palembang yang rasio kemandirian keuangannya sebesar 36,33%. Salah satu penyebabnya adalah PAD pada Kota Palembang bernilai besar, hal ini ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang Kota Palembang. Selain itu, Kota Palembang merupakan pusat aktivitas perekonomian di Sumatera Selatan.

Rasio Solvabilitas Anggaran pada masing-masing pemerintah daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kisaran diatas 100%. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran. Namun demikian, terdapat 4 pemerintah daerah yang rasio solvabilitas anggarannya dibawah 100% yaitu Kab. Musi Banyuasin 74,4%, Kab Lahat 88,6%, kab. OKU Selatan 90,8% dan Kab. Lubuk Linggau 53,2%. Lebih besarnya belanja pemerintah daerah dibanding pendapatan merupakan penyebab dari hal tersebut. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi-potensi peningkatan PAD guna menopang belanja.

Rasio Solvabilitas Layanan Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2024 menunjukkan angka Rp14.262.750 yang berarti bahwa untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis pelayanan yang akan diterima oleh per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dipenuhi /dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp14.262.750 atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menyediakan fasilitas atau proses pelayanan publik yang setara dengan nilai aset pemda sebesar Rp14.262.750 untuk setiap penduduk yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Rasio Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I

tahun 2024 dan 2023 masing-masing berada pada rata-rata 69,56% dan 467,59% Hal tersebut mencerminkan bahwa pada periode triwulan I tahun 2024, pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum cukup untuk menutupi belanja operasional. Hanya terdapat satu pemda yang nilai solvabilitas operasionalnya berada pada kisaran diatas 100%, yaitu Pemprov. Sumatera Selatan, sebesar 158,8% yang mengindikasikan bahwa Prov. Sumsel berada dalam kemampuan yang baik dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Seluruh pemda lingkup Sumsel perlu mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar belanja-belanja operasional dapat tercukupi.

Terdapat penurunan rasio solvabilitas operasional pada triwulan I tahun 2024 dibanding 2023, yang disebabkan penurunan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer serta diikuti dengan meningkatnya beban operasi.

Rasio Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024 dan 2023 masing-masing pada rata-rata minus 30,50% dan 62,96%. Hal ini mencerminkan bahwa pada triwulan I tahun 2024 pendapatan yang dikumpulkan, setelah dikurangi DAK, belum cukup atau kurang untuk membiayai kebutuhan utama yaitu pembayaran beban operasional dan pembayaran pokok utang. Rasio fleksibilitas keuangan triwulan I tahun 2024 turun dibanding dengan tahun 2023. Terdapat penurunan pendapatan dan peningkatan belanja. Pemda lingkup Sumsel perlu untuk memfokuskan pada optimalisasi PAD agar kesinambungan fiskal terjaga utamanya dalam menghadapi risiko peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan beban maupun peningkatan kapasitas utang.

3. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

Analisis indikator fiskal menggambarkan kondisi keseimbangan fiskal pemerintah berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Rasio-rasio berdasarkan analisis fiskal LSKP sampai dengan 31 Maret 2024 sebagai berikut (Rp miliar):

NO	Jenis Tingkatan Pemerintah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Rinjaman/Pinjaman Netto	Keseimbangan Operasi Primer (NOB+Interest Expense)	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	4.486,73	4.486,73	3.880,95	4.486,73	3.880,95
2	Pemerintah Kab/kota	1.344,90	1.344,90	1.190,59	1.348,74	1.194,42
3	Pemerintah Provinsi	2.368,96	2.368,96	2.339,33	2.370,22	2.340,58
4	Pemerintah Umum	8.200,60	8.200,60	7.410,87	8.205,69	2.062,02



Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai keseimbangan fiskal menunjukkan nilai positif pada semua level pemerintahan. Hal ini menunjukkan baik pada pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota terjadi surplus.

Analisis indikator fiskal makro ekonomi memberikan gambaran tambahan atas kondisi fiskal melalui indikator pajak langsung/tidak langsung, pajak modal, dan belanja konsumsi final pemerintah. Indikator fiskal makro ekonomi di Sumatera Selatan sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut (Rp miliar).

NO	Jenis Tingkatan Pemerintah	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Pemerintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	1.539,38	1.558,75	0,00	3.131,06	4.497,50
2	Pemerintah Kab/Kota	9,13	189,06	39,75	2.284,75	1.305,16
3	Pemerintah Provinsi	0,00	338,69	0,00	439,36	2.368,96
4	Pemerintah Umum	1.548,50	2.086,51	39,75	5.855,17	8.171,62

Dari tabel di atas diketahui, pada triwulan I 2024, sebagian besar pajak langsung berasal dari pemungutan pajak langsung oleh pemerintah pusat, yaitu sebesar 99,41 %. Demikian juga besaran pajak tidak langsung terutama berasal dari pemerintah pusat yaitu 74,71 %, sedangkan pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota masing-masing menyumbang sebesar 16,2% dan 9,06%. Pajak modal sepenuhnya berasal dari pemerintah kab/kota, yaitu pajak yang dibebankan atas nilai aset atau kekayaan neto unit institusi atau nilai aset yang ditransfer antar unit institusi. Selanjutnya belanja konsumsi final pada triwulan I 2024 sebagian besar merupakan belanja pemerintah pusat, yaitu sebesar 53,48%, diikuti oleh pemerintah kab/kota sebesar 39,02% dan pemerintah provinsi sebesar 7,5%.

4. Analisis Indikator Pembiayaan

Jika dilihat dari indikator pembiayaan, seluruh pembiayaan di Sumatera Selatan berasal dari pembiayaan dalam negeri, dan pada seluruh tingkat pemerintahan, pemerintah pusat berkontribusi paling besar. Analisis Indikator Pembiayaan di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut (Rp miliar)

NO	Jenis Tingkatan Pemerintah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	3.880,95	3.880,95	0,00	0,00	0,00
2	Pemerintah Kab/Kota	1.190,59	1.190,59	0,00	0,00	0,00
3	Pemerintah Provinsi	2.339,33	2.339,33	0,00	0,00	0,00
4	Pemerintah Umum	7.410,87	7.410,87	0,00	0,00	0,00

5. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

Analisis berdasarkan indikator kekayaan dan utang pemerintah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut (Rp miliar):

NO	Jenis Tingkatan Pemerintah	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	1.921,34	1.921,34
2	Pemerintah Kab/Kota	2.055,79	2.055,79
3	Pemerintah Provinsi	932,76	932,76
4	Pemerintah Umum	4.459,57	4.459,57

Utang Bruto di Sumatera Selatan terdapat pada seluruh tingkatan pemerintahan, dan sebagian besar berupa kewajiban jangka pendek.

C. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Yang Berdampak Pada Kinerja Keuangan Dan Statistik

Mulai tahun 2024, Pemerintah menetapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai satu-satunya aplikasi (*single application*) yang digunakan untuk mendukung pengolahan data dan informasi pada pemerintah daerah. SIPD mencakup sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, selain itu sebagai sarana pengumpulan, pengolahan data penyajian informasi keuangan daerah.

Dalam salah satu fungsi khususnya sebagai sarana untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan daerah, keberadaan SIPD ini tentunya sangat penting dan krusial dalam mendukung penyediaan data yang valid untuk penyusunan LKPD, namun dalam implementasinya di pemerintah daerah masih banyak ditemukan kendala terkait hal tersebut di beberapa pemda lingkup Sumsel.

Pada tanggal 7 Maret, Kanwil DJPb melaksanakan FGD terkait implementasi SIPD yang diikuti oleh BPKP perwakilan Sumsel dan seluruh BPKAD lingkup Prov. Sumsel. Dari kegiatan tersebut dapat dijangar beberapa kendala implementasi SIPD di beberapa Pemda lingkup Sumsel yang secara umum diantaranya:

- Masih ditemukan data *connection* yang masih *fail* antar modul pada SIPD seperti perbedaan data pagu anggaran antara modul pelaporan dengan modul perencanaan dan penganggaran ataupun juga terjadi data *double* setelah dilakukan *approving* data oleh *user* dan kendala lainnya pada modul pelaporan.
- Akses *login* ke server SIPD yang masih lambat dan konektivitas SIPD yang masih lemah.
- Dukungan aplikasi dari Kemendagri dirasa kurang, terdapat *hotline*, namun antrian sangat





panjang dan respon sangat lambat (bisa sehari-hari – satu minggu)

- d. Kesiapan SDM yang belum memadai pada pemda dikarenakan masih minimnya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kemendagri

Hal-hal tersebut menjadi sangat *urgent* karena hal ini berkaitan dengan kualitas daripada laporan keuangan yang dihasilkan nantinya sebagai bukti pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah digunakan.

D. Resume Pelaksanaan Kegiatan

Pada periode triwulan I 2024, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat dan daerah telah dilakukan kegiatan oleh Bidang PAPK sebagai berikut:

- 1. Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan dan penyajian laporan keuangan satker lingkup Polda Sumsel pada tanggal 23 s.d. 26 Januari 2024.



Peserta kegiatan merupakan satuan kerja lingkup Polda Sumsel dan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan transaksi-transaksi *to do list* dan transaksi dalam konfirmasi (TDK) serta membahas isu-isu permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.



Dari kegiatan ini, satuan kerja lingkup Polda Sumsel dapat menyusun laporan keuangan tahun 2023 *unaudited* yang lebih berkualitas

- 2. Pada tanggal 12 dan 13 Februari 2024, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Laporan Keuangan UAPPA-W dan UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2023 *Unaudited*.



Kegiatan ini dilakukan secara *onsite* dengan peserta seluruh pegawai Bidang PAPK, seksi terkait pada KPPN dan seluruh petugas penyusun laporan satker lingkup Kanwil DJPb Sumsel. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah LK-UAPPAW yang disusun oleh satker wilayah lingkup DJPb Sumsel dan LKBUN yang disusun oleh KPPN lingkup DJPb Sumsel semakin berkualitas dan disampaikan tepat waktu.

- 3. Pada tanggal 7 Maret 2024, dilaksanakan kegiatan FGD Strategi Implementasi SIPD RI dan Peningkatan Kualitas LKPD dalam upaya meraih WTP yang diikuti oleh Kanwil DJPb Sumsel, BPKP Perwakilan Sumsel dan Seluruh BPKAD lingkup Prov. Sumsel.





Kegiatan dilaksanakan dalam rangka *sharing knowledge* dan juga menjangring isu-isu permasalahan implementasi SIPD di pemda. Disamping itu dibahas juga strategi-strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meraih opini WTP atas LKPD tahun 2023.

- Selanjutnya, dalam rangka publikasi laporan GFS triwulan 2023 *Preliminary*, telah dilakukan melalui fasilitas *Knowledge Management System* (KMS) Kanwil DJPb Sumsel yang dapat diakses secara publik melalui [link: bit.ly/RAGITDOBEL03](http://link:bit.ly/RAGITDOBEL03).



Untuk amplifikasi lebih lanjut, publikasi GFS juga dilakukan melalui media sosial Instagram milik Kanwil DJPb Prov. Sumsel pada alamat @DJPbSumsel

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kinerja APBN di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Maret 2024 dari sisi pendapatan mengalami kontraksi, tumbuh negatif 6,5% (yoy), yang disebabkan menurunnya penerimaan pajak sebesar 9,6% (yoy). Dari sisi belanja, kinerja APBN tumbuh positif 30,3%, meningkatnya belanja triwulan I 2024 terdapat pada belanja barang terutama dalam rangka tahapan pemilu pada satker lingkup KPU dan Bawaslu.
- Secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pemda lingkup Sumatera Selatan tercatat pada kategori kurang (*range* 10%-20%) dan jika dilihat per pemda masing-masing, masih banyak pemda lingkup Sumatera Selatan yang kriteria kemandirian keuangan daerahnya masuk dalam kategori sangat kurang (*range* 0%-10%), yaitu sebanyak dua belas pemda.
- Kinerja APBD dari sisi pendapatan sampai dengan 31 Maret 2024 tumbuh positif sebesar 34,1% (yoy). Pertumbuhan positif juga diikuti oleh kinerja APBD dari sisi belanja, yang tumbuh 6,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya

Peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan transfer sebesar 62,6% yang cukup untuk menopang turunnya kinerja dari sisi PAD, yang berkontraksi tumbuh negatif 42,5%. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan pemda lingkup Sumsel terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi.

Jika dicermati lebih jauh, turunnya realisasi PAD dipengaruhi turunnya realisasi penerimaan pajak daerah yang menjadi kontributor utama, hal ini terindikasi terjadi sebagai dampak dari kebijakan baru PDRD Sumsel tahun 2024 diantaranya: penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang semula 1,5% menjadi 1%, tidak diberlakukannya lagi tarif pajak progresif untuk PKB kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, serta tidak dikenakannya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Pemerintah daerah Sumsel perlu untuk mengoptimalkan





sektor-sektor lain seperti jasa perdagangan, industri pengolahan, ataupun pariwisata untuk menyerap penerimaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan transfer pemerintah pusat.

4. Implementasi SIPD, yang merupakan aplikasi tunggal yang digunakan pemerintah daerah pada tahun 2024 untuk mendukung pengolahan data dan informasi pada pemerintah daerah yang mencakup sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, dan sebagai sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi keuangan daerah, masih banyak ditemukan kendala. Kurang sinkronnya data antar modul, koneksi ke server yang masih lambat, kurang *responsifnya hotline/helpdesk* serta yang paling utama, kesiapan SDM merupakan kendala yang ditemui di lapangan. Selain itu, kendala teknis terkait SIPD juga menyebabkan kendala realisasi anggaran termasuk pembayaran gaji pada beberapa OPD

Untuk mengimplementasikan SIPD perlu keseriusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, dan pemerintah daerah. Suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang memiliki peran penting untuk menentukan suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Pemda bersama Kemendagri perlu memberikan pelatihan kepada pegawai yang akan menggunakan SIPD RI agar mereka dapat memahami dan mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut.

Selanjutnya, untuk keberhasilan implementasi SIPD, baik pemda maupun Kemendagri perlu memastikan infrastruktur teknologi Informasi yang digunakan untuk mendukung aplikasi SIPD RI memadai dan mampu menangani kebutuhan, termasuk infrastruktur jaringan, server, keamanan data, dan tentunya kesiapan dari aplikasi itu sendiri serta dukungan teknis lainnya. Evaluasi secara berkala juga harus dilakukan, usulan maupun *feed back* dari pengguna aplikasi sangat diperlukan penyedia aplikasi agar sistem berjalan sesuai dengan

rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Kanwil DJPb Sumsel dalam menjalankan perannya sebagai *financial advisor* akan terus melakukan kajian atas kendala implementasi SIPD melalui diskusi dan FGD secara langsung dengan pemda terkait, saat ini Kanwil DJPb Sumsel dan BPKP Perwakilan Sumsel juga sedang dalam proses pembahasan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemda serta pengawasan terhadap Opini BPK terhadap LKPD se-Sumsel





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FACE LAPORAN

LKPK & LSKP TRIWULAN I 2024
Kanwil DJPb Sumsel



LAPORAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
A	Pendapatan Negara dan Hibah	5.520.047.353.496	5.560.689.152.124
A.1	Pendapatan Perpajakan	3.674.805.330.794	4.481.276.109.478
1	Pajak Dalam Negeri	3.614.484.435.388	4.398.324.878.420
2	Pajak Perdagangan Internasional	60.320.895.406	82.951.231.058
A.2	Pendapatan Bukan Pajak	1.845.200.702.788	1.074.049.108.226
1	Pendapatan Sumber Daya Alam		
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	94.849.507.676	208.577.037.494
3	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	308.321.154.101	317.431.084.013
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	833.804.435.480	
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
7	Bantuan Keuangan - LRA		15.629.415.212
8	Pendapatan BLU	608.225.605.531	532.411.571.507
A.3	Pendapatan Hibah	41.319.914	5.363.934.420
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	41.319.914	5.363.934.420
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri		
B	Belanja Pemerintah	8.505.225.412.007	7.439.596.856.346
1	Belanja Pegawai	3.474.166.906.226	2.969.435.907.832
2	Belanja Barang Dan Jasa	2.301.194.643.200	1.822.650.980.651
3	Belanja Modal	791.242.310.092	484.867.462.003
4	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	5.092.797.667	11.758.046.798
5	Subsidi	332.465.675	1.536.183.925
6	Hibah	78.181.131.531	67.537.979.259
7	Belanja Bantuan Sosial	1.692.930.977	3.153.844.500
8	Belanja Lain-lain	2.025.114.378	885.205.000
9	Belanja Tak Terduga		
10	Transfer	1.851.297.112.261	2.077.771.246.377
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(2.985.178.058.511)	(1.878.907.704.222)
D	Pembiayaan	8.327.880.474.511	2.794.696.978.404
	Penerimaan Pembiayaan	8.343.253.481.326	2.921.298.923.514
	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	8.343.253.481.326	2.921.298.923.514
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan		
2	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan		

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
3	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		
4	Penerimaan Pembiayaan - Pemda	8.343.253.481.326	2.921.298.923.514
	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		
	Pengeluaran Pembiayaan	15.373.006.815	126.601.945.110
	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	7.704.327.147	83.532.019.682
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	7.704.327.147	5.168.272.204
2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan		78.363.747.478
3	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
4	Pembentukan Dana Cadangan		
	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri		
	Penyertaan Modal Negara	7.668.679.668	43.069.925.428
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	5.342.702.416.000	915.789.274.182

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	3.880.950.027.591	4.149.235.145.626
A.1	Pendapatan Perpajakan	3.098.180.234.226	3.425.355.279.667
1	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	3.037.859.338.820	3.342.404.048.609
2	Pajak Perdagangan Internasional	60.320.895.406	82.951.231.058
A.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	782.769.793.365	723.879.865.959
1	Penerimaan Sumber Daya Alam		
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
3	Pendapatan PNPB Lainnya	533.984.539.762	265.680.317.459
4	Pendapatan BLU	248.785.253.603	458.199.548.500
A.3	Pendapatan Hibah		
1	Hibah		
B	BELANJA NEGARA	10.396.044.656.171	7.978.326.331.515
B.1	Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	3.739.483.244.749	2.318.186.995.629
1	Belanja Pegawai	1.486.831.004.160	1.016.790.444.144
2	Belanja Barang	1.644.229.244.076	978.838.813.427
3	Belanja Modal	607.108.419.513	320.929.893.558
4	Belanja Bantuan Sosial	1.314.577.000	1.627.844.500
B.2	Transfer ke Daerah	6.656.561.411.422	5.660.139.335.886
1	Dana Transfer Umum	4.915.928.281.940	4.354.947.663.000
	Transfer Dana Bagi Hasil	1.467.027.189.940	1.355.468.939.000
	Transfer Dana Alokasi Umum	3.448.901.092.000	2.999.478.724.000
2	Dana Transfer Khusus	985.578.078.682	850.312.570.386
	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik		
	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	985.578.078.682	850.312.570.386
2	Dana Insentif Daerah/fiskal		
3	Dana Desa	755.055.050.800	454.879.102.500
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	(6.515.094.628.580)	(3.829.091.185.889)
D	Pembiayaan		
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA/SIKPA	(6.515.094.628.580)	(3.829.091.185.889)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
A	Pendapatan Pemerintah Daerah	6.993.036.445.230	5.215.195.282.464
A.1	Pendapatan Asli Daerah	808.935.808.872	1.406.621.348.926
1	Pajak Daerah	576.625.096.568	1.055.920.829.904
2	Retribusi Daerah	11.961.669.366	14.753.404.777
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.849.507.676	208.577.037.494
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.499.535.262	127.370.076.752
A.2	Pendapatan Transfer	6.184.059.316.444	3.802.786.299.085
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	6.109.302.826.964	3.779.877.517.585
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	169.610.741.265	211.169.363.058
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.093.040.616.335	743.351.351.712
1.3	Dana Alokasi Umum	4.282.705.527.480	2.563.631.431.656
1.4	Dana Alokasi Khusus	563.945.941.884	261.725.371.159
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	74.756.489.480	22.908.781.500
2.1	Dana Penyesuaian		
2.2	Dana Insentif Daerah		
2.3	Dana Desa	74.756.489.480	22.908.781.500
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi		
3.1	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA		
4	Transfer Bantuan Keuangan		
A.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	41.319.914	5.787.634.453
1	Pendapatan Hibah	41.319.914	5.363.934.420
2	Pendapatan Lainnya		423.700.033
B	Belanja Negara	3.463.119.875.161	3.265.011.800.704
B.1	Belanja Operasi	2.728.286.050.040	2.878.815.840.895
1	Belanja Pegawai	1.987.335.902.066	1.952.645.463.688
2	Belanja Barang dan Jasa	656.965.399.124	843.812.167.224
3	Belanja Bunga	5.092.797.667	11.758.046.798
4	Subsidi	332.465.675	1.536.183.925
5	Hibah	78.181.131.531	67.537.979.259
6	Bantuan Sosial	378.353.977	1.526.000.000
B.2	Belanja Modal	184.133.890.579	163.937.568.445
1	Belanja Modal Tanah		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.325.542.013	49.346.617.899
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.489.546.419	15.826.930.379
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	100.164.249.894	96.796.773.167
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.373.013	153.050.000

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
6	Belanja Modal Aset Lainnya	6.034.300	1.795.748.000
7	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	1.129.217.737	
8	Belanja Modal BLUD	22.948.927.203	18.449.000
B.3	Belanja Tak Terduga	2.025.114.378	885.205.000
1	Belanja Tak Terduga	2.025.114.378	885.205.000
C	Transfer	548.674.820.164	221.373.186.364
C.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	316.773.560.345	3.490.642.975
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	316.773.560.345	3.187.203.870
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		303.439.105
C.2	Transfer Bantuan Keuangan	231.901.259.819	217.882.543.389
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya		90.127.159.993
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	231.901.259.819	127.755.383.396
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
D	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	3.529.916.570.069	1.950.183.481.760
E	Pembiayaan	8.327.880.474.511	2.794.696.978.404
E.1	Penerimaan Pembiayaan	8.343.253.481.326	2.921.298.923.514
1	Penggunaan SILPA	8.343.253.481.326	1.609.660.005.436
2	Pencairan Dana Cadangan		1.311.638.918.077
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
4	Pinjaman Dalam Negeri		
5	Penerimaan Kembali Piutang		
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		
E.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.373.006.815	126.601.945.110
1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.668.679.668	43.069.925.428
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.704.327.147	83.532.019.682
4	Pemberian Pinjaman Daerah		
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		
F.	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	11.857.797.044.580	4.744.880.460.164

**NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 MARET 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
A	ASET	332.127.639.759.892	326.285.824.291.482
A.1	Aset Lancar	21.503.264.881.912	10.176.807.078.412
1	Kas dan setara kas	14.418.243.425.040	3.914.020.661.669
2	Uang muka rekening BUN-khusus pusat		
3	Investasi jangka pendek	388.548.923.943	388.548.923.943
4	Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	42.369.569.733	46.261.230.405
5	Piutang	3.337.116.521.917	2.642.926.994.894
	Piutang Perpajakan	2.384.037.546.222	1.532.513.262.642
	Piutang Bukan Pajak	2.653.564.927.058	2.653.378.045.322
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3.317.598.034	3.317.598.034
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	104.768.125	163.438.057
	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman		
	Piutang lain-lain	46.106.900.513	117.901.203.636
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.750.015.218.035)	(1.664.346.552.797)
6	Persediaan	3.316.986.441.280	3.185.049.267.501
7	Piutang PFK		
A.2	Investasi jangka panjang	11.099.216.355.713	11.091.547.676.045
1	Investasi jangka panjang non permanen	37.373.807.338	37.373.807.338
2	Investasi jangka panjang permanen	11.061.842.548.375	11.054.173.868.707
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
A.3	Aset Tetap	290.472.299.380.413	295.450.645.050.715
1	Tanah	158.966.583.537.975	158.966.583.537.975
2	Peralatan dan Mesin	31.984.635.289.774	31.944.876.918.410
3	Gedung dan Bangunan	41.424.385.072.104	41.531.771.212.717
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	154.511.882.070.756	154.536.405.562.291
5	Aset tetap lainnya	3.140.797.108.903	3.137.797.970.195
6	Konstruksi dalam pengerjaan	7.591.890.222.724	7.405.299.526.561
7	Konsesi Jasa	4.221.948.650.263	4.423.874.645.407
8	Akumulasi penyusutan	(111.502.367.355.878)	(106.495.964.322.841)
9	Aset Tetap Yang Belum Diregister	132.544.783.792	
A.4	Properti Investasi	16.581.036.000	16.581.036.000
A.5	Dana Cadangan		100.011.660.275
1	Dana Cadangan		100.011.660.275
A.6	Piutang Jangka Panjang	38.339.718.101	38.281.229.097
1	Tagihan piutang penjualan angsuran	820.127.783	820.127.783
2	Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	30.370.984.291	30.346.860.359
3	Piutang jangka panjang kredit pemerintah		

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
4	Piutang jangka panjang lainnya	7.315.853.551	7.281.307.551
5	Penyisihan piutang jangka panjang	(167.247.524)	(167.066.596)
A.7	Aset Lainnya	8.997.938.387.752	9.411.950.560.938
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	2.136.324.332.073	2.136.324.332.073
2	Aset tidak berwujud	768.660.298.464	771.502.426.292
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	32.722.394.610	456.382.892.008
4	Dana Penjaminan		
5	Dana Kelolaan BLU		
6	Aset lain-lain	6.875.564.513.024	6.879.536.916.496
7	Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya		
8	Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		
9	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(815.333.150.419)	(831.796.005.930)
B	KEWAJIBAN/UTANG	4.459.568.681.571	4.985.719.434.778
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	2.779.258.261.272	3.113.501.886.335
1	Utang perhitungan pihak ketiga	1.071.067.472	1.071.067.472
2	Utang kepada pihak ketiga	1.541.221.814.833	1.787.467.565.455
3	Utang bunga	3.954.187.929	3.954.187.929
4	Utang subsidi		
5	Utang Transfer	54.787.390.022	1.242.737.152
6	Bagian lancar utang jangka panjang	288.359.003.915	296.063.331.062
7	Utang surat perbendaharaan negara		
8	Utang Yang Belum Ditagihkan	93.870.954.015	
9	Utang jangka pendek lainnya	456.098.313.640	684.043.068.124
10	Uang Muka	736.405.268	525.975.970
11	Utang Jangka Pendek Lainnya	339.159.124.178	339.133.953.171
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.680.310.420.299	1.872.217.548.443
1	Utang jangka panjang dalam negeri	432.534.954.446	432.534.954.446
2	Utang jangka panjang luar negeri		
B.3	Kewajiban Konsesi Jasa	1.247.775.465.853	1.439.682.593.997
1	Kewajiban Konsesi Jasa	1.247.775.465.853	1.439.682.593.997
C	EKUITAS	327.668.071.078.320	321.300.104.856.704

**NERACA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah)**

No	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
A	ASET	209.105.215.906.584	206.871.467.507.500
A.1	Aset lancar	6.912.147.403.973	5.590.165.368.071
1	Kas dan Setara Kas	2.156.671.763.135	1.656.924.767.363
1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	46.678.195.063	1.182.438.238
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.581.911.724	350.128.001
1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.095.576.919.621	555.922.486.694
1.4	Kas pada BLU	1.011.834.736.727	1.099.469.714.430
2	Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)	305.900.000.000	305.900.000.000
3	Belanja dibayar di muka	7.971.213.848	8.606.087.176
4	Uang Muka Belanja	38.387.441	32.409.076
5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	6.457.905.909	9.720.671.618
6	Piutang	1.976.686.029.684	1.282.496.502.661
6.1	Piutang Pajak	2.384.037.546.222	1.532.513.262.642
6.2	Piutang Bukan Pajak	627.521.003.361	627.334.121.625
6.3	Bagian Lancar TP/TGR	104.768.125	163.438.057
6.4	Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	6.175.953.000	
6.5	Piutang dari Kegiatan BLU	31.090.901.945	109.061.158.068
6.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.072.244.142.969)	(986.575.477.731)
7	Persediaan	2.445.682.909.860	2.326.484.930.177
8	Persediaan Belum Diregister	12.739.194.096	
A.2	Investasi Jangka Panjang		
A.3	Aset Tetap	201.475.870.576.621	200.150.144.494.957
1	Tanah	133.625.761.192.636	133.625.761.192.636
2	Peralatan dan Mesin	14.927.951.814.952	14.935.518.985.601
3	Gedung dan Bangunan	13.225.707.231.654	13.345.582.918.686
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.555.751.547.179	69.680.439.288.608
5	Aset Tetap Lainnya	626.936.572.597	624.007.806.902
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.603.693.736.391	5.418.232.257.965
7	Aset Tetap Belum Diregister	132.544.783.792	
8	Aset Konsesi Jasa	4.221.948.650.263	4.423.874.645.407
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(40.444.424.952.843)	(41.903.272.600.848)
A.4	Properti Investasi	16.581.036.000	16.581.036.000
A.5	Piutang Jangka Panjang	7.336.641.287	7.278.152.283
1	Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	188.035.260	163.911.328
2	Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.315.853.551	7.281.307.551
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(167.247.524)	(167.066.596)
A.6	Aset Lainnya	693.280.248.703	1.107.298.456.189

No	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
2	Aset Tak Berwujud	277.198.427.577	280.042.819.577
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	32.722.394.610	456.382.892.008
4	Aset Lain-lain	933.062.396.012	938.349.376.409
5	Akumulasi Penyusutan	(551.012.032.496)	(567.476.631.805)
5.1	Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(449.475.420.122)	(457.995.457.723)
5.2	Akum. Amortisasi Aset Lainnya	(101.536.612.374)	(109.481.174.082)
B	KEWAJIBAN	1.921.337.602.871	2.439.784.028.931
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	673.560.381.792	1.000.099.679.708
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	310.919.840.067	557.165.590.689
2	Utang Transfer	54.787.390.022	1.242.737.152
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	203.932.821.170	399.036.785.725
4	Uang Jangka Pendek Lainnya	(32.439.764.194)	16.815.312
5	Hibah Yang Belum Disahkan	126.352.704.528	
6	Pendapatan Diterima Dimuka	9.270.984.931	42.111.774.860
7	Uang Muka dari KPPN	736.405.268	525.975.970
B.2	Kewajiban Jangka Panjang		1.439.684.349.223
C	EKUITAS	207.183.878.331.113	204.431.683.478.569
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	209.105.215.933.984	206.871.467.507.500
Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas			

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 MARET 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
A	ASET	123.022.423.853.308	119.414.356.783.982
A.1	ASET LANCAR	14.591.117.477.939	4.586.641.710.341
1	Kas dan Setara Kas	12.261.571.661.905	2.257.095.894.306
1.1	Kas di Kas Daerah	6.537.093.670.061	1.956.341.962.905
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	620.089.123	125.690.668
1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	865.086.413	561.624.964
1.4	Kas di BLUD	3.017.270.965.680	239.064.509.330
1.5	Kas Lainnya	2.702.068.246.735	58.707.377.434
1.6	Setara Kas	3.653.603.892	2.294.729.005
2	Investasi Jangka Pendek	82.648.923.943	82.648.923.943
3	Piutang Pendapatan	2.026.043.923.697	2.026.043.923.697
4	Piutang Lainnya	12.157.643.602	12.157.643.602
5	Penyisihan Piutang	(677.771.075.066)	(677.771.075.066)
5	Beban Dibayar Dimuka	27.902.062.535	27.902.062.535
7	Persediaan	858.564.337.324	858.564.337.324
A.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	11.099.216.355.713	11.091.547.676.045
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	37.373.807.338	37.373.807.338
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	33.545.100.361	33.545.100.361
1.2	Dana Bergulir	3.828.706.977	3.828.706.977
1.3	Cadangan Dana Bergulir		
1.4	Investasi Non Permanen Lainnya		
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	11.061.842.548.376	11.054.173.868.707
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.022.337.449.880	11.015.668.770.212
2.2	Investasi Permanen Lainnya	39.505.098.496	38.505.098.496
A.3	ASET TETAP	88.996.428.803.792	95.300.500.555.758
1	Tanah	25.340.822.345.339	25.340.822.345.339
2	Peralatan dan Mesin	17.056.683.474.822	17.009.357.932.809
3	Gedung dan Bangunan	28.198.677.840.450	28.186.188.294.031
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.956.130.523.577	84.855.966.273.683
5	Aset Tetap Lainnya	2.513.860.536.306	2.513.790.163.293
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.988.196.486.333	1.987.067.268.596
7	Akumulasi Penyusutan	(71.057.942.403.035)	(64.592.691.721.993)
	Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(13.677.615.460.995)	(12.429.893.551.631)
	Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(6.687.854.078.154)	(6.079.867.343.776)
	Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(49.326.548.925.153)	(44.841.181.791.373)
	Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(1.365.923.938.733)	(1.241.749.035.212)

NO.	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
A.4	Dana Cadangan		100.011.660.275
A.5	ASET LAINNYA	8.335.661.215.863	8.335.655.181.563
1	Tagihan Jangka Panjang	31.003.076.814	31.003.076.814
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.136.324.332.073	2.136.324.332.073
3	Aset Tidak Berwujud	227.140.752.964	227.140.232.590
4	Aset Lain-lain	5.941.193.054.012	5.941.187.540.087
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
B	KEWAJIBAN	2.538.231.078.700	2.545.935.405.847
B.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.105.697.879.480	2.113.402.206.627
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.071.067.472	1.071.067.472
2	Utang Bunga	3.954.187.929	3.954.187.929
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	288.359.003.915	296.063.331.062
4	Pendapatan Diterima Dimuka	21.243.919.382	21.243.919.382
5	Utang Belanja	1.230.301.974.766	1.230.301.974.766
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	560.767.726.015	560.767.726.015
B.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	432.533.199.220	432.533.199.220
1	Utang Dalam Negeri	368.801.249.813	368.801.249.813
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	63.731.949.408	63.731.949.408
C	EKUITAS	120.484.192.774.607	116.868.421.378.135
D	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	123.022.423.853.308	119.414.356.783.982
Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas			

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	8.134.587.883.985	10.416.568.630.034
1	Pendapatan Perpajakan-LO	380.668.667.338	3.852.409.546.714
2	Pendapatan Bukan Pajak-LO	245.126.630.472	522.937.157.656
2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam		
2.2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	94.849.507.676	208.577.037.494
2.3	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	150.277.122.796	314.360.120.162
3	Pendapatan Transfer- LO	810.065.242.122	40.642.866
3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	808.616.074.480	
3.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		
3.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		
3.4	Bantuan Keuangan - LO	1.449.167.642	40.642.866
4	Pendapatan BLU -LO	1.887.460.000	358.702.252.468
4.1	Pendapatan Jasa BLU - LO	1.863.460.000	348.126.251.651
4.2	Pendapatan Hibah BLU - LO		3.000.000
4.3	Pendapatan Lainnya BLU - LO	24.000.000	10.573.000.817
5	Pendapatan Hibah-LO	(13.266.180.239)	21.915.994.412
5.1	Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	(13.266.180.239)	21.915.994.412
6	Pendapatan lainnya-LO	6.710.106.064.292	5.660.563.035.919
6.1	Pendapatan lainnya Pemda		423.700.033
6.2	Pendapatan Penyesuaian Akruwal		
6.3	Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	6.710.106.064.292	5.660.139.335.886
A.2	BEBAN OPERASIONAL	11.823.134.201.040	7.101.453.970.061
1	Beban Pegawai	2.519.119.849.264	3.328.262.010.670
2	Beban Persediaan		39.791.525.076
3	Beban Barang dan Jasa	796.684.789.911	1.556.611.464.140
4	Beban Bunga	5.092.797.667	11.758.046.798
5	Beban Subsidi	332.465.675	1.536.183.925
6	Beban Hibah	78.181.131.531	67.537.979.259
7	Beban Bantuan Sosial	378.353.977	1.539.106.200
8	Beban Lain-lain		
9	Beban Akruwal Lainnya	6.465.250.681.042	(158.434.037)
10	Beban Transfer	1.958.094.131.972	2.094.576.088.029
A.3	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(3.688.546.317.055)	3.315.114.659.973
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
B.1	Surplus (Defisist) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi		
B.1	Surplus/(Defisit) Pempus Pelepasan Aset Non Lancar		2.182.086.943

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
B.2	Surplus/(Defisit) Penpus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
B.3	Surplus/(Defisit) Penpus Kegiatan Non Operasional Lainnya	19.092.710.243	62.438.123.848
B.4	Surplus/(Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar		
B.5	Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
B.6	Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya		
B.7	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	19.092.710.243	64.620.210.791
C	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.669.453.606.812)	3.379.734.870.764
	POS LUAR BIASA		
D	SURPLUS/(DEFISIT) LO	(3.669.453.606.812)	3.379.734.870.764

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	6.516.994.680.719	9.011.218.563.291
1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	(195.956.429.230)	2.796.488.716.810
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	(1.941.124.676)	1.587.645.114.229
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	(194.048.992.097)	1.029.674.939.715
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		15.924.584.320
1.4	Pendapatan Cukai		40.000.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya		40.585.237.339
1.6	Pendapatan Bea Masuk		52.289.430.000
1.7	Pendapatan Bea Keluar		70.320.876.000
1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain		8.535.207
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	16.152.545.810	538.038.450.603
2.1	Pendapatan BLU	1.887.460.000	358.702.252.468
2.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	14.265.085.810	179.336.198.135
3	PENDAPATAN HIBAH	(13.307.500.153)	16.552.059.992
4	PENDAPATAN PENYESUAIAN	6.710.106.064.292	5.660.139.335.886
4.1	Pendapatan Dropping Dana Transfer	6.710.106.064.292	5.660.139.335.886
A.2	BEBAN OPERASIONAL	7.332.336.997.343	7.724.917.229.481
1	Beban Pegawai	531.783.947.198	1.375.616.546.982
2	Beban Persediaan		39.770.900.076
3	Beban Barang dan Jasa	71.601.144.370	408.442.710.515
4	Beban Pemeliharaan	6.402.677.716	103.048.351.999
5	Beban Perjalanan Dinas	12.443.163.767	64.197.648.472
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		73.847.063.388
7	Beban Bantuan Sosial		13.106.200
8	Beban Lain-lain		
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
10	Beban Penyusihan Piutang Tak Tertagih		(158.434.037)
11	Beban Transfer	6.710.106.064.292	5.660.139.335.886
A.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(815.342.316.624)	1.286.301.333.810
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
B.1	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		2.182.086.943
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.559.922.537
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar		377.835.594
B.2	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		2.182.086.943

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
B.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	19.092.710.243	62.438.123.848
1	Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	19.092.325.243	62.591.974.060
2	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	(385.000)	153.850.212
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	19.092.710.243	64.620.210.791
C	SURPLUS/(DEFISIT) LO	(796.249.606.381)	1.350.921.544.601

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN	6.918.279.955.750	5.192.286.500.964
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	808.935.808.872	1.406.621.348.926
1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	576.625.096.568	1.055.920.829.904
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	11.961.669.366	14.753.404.777
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	94.849.507.676	208.577.037.494
1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	125.499.535.262	127.370.076.752
2	PENDAPATAN TRANSFER	6.109.302.826.964	3.779.877.517.585
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	6.109.302.826.964	3.779.877.517.585
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	169.610.741.265	211.169.363.058
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.093.040.616.335	743.351.351.712
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.282.705.527.480	2.563.631.431.656
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	563.945.941.884	261.725.371.159
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO		
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO		
2.4	Bantuan Keuangan		
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	41.319.914	5.787.634.453
3.1	Pendapatan Hibah	41.319.914	5.363.934.420
3.2	Pendapatan Lainnya		423.700.033
A.2	BEBAN	9.791.483.956.181	3.163.473.174.801
1	BEBAN OPERASI	9.242.809.136.017	2.942.099.988.436
1.1	Beban Pegawai	1.987.335.902.066	1.952.645.463.688
1.2	Beban Barang dan Jasa	706.237.804.058	907.096.314.766
1.3	Beban Bunga	5.092.797.667	11.758.046.798
1.4	Beban Subsidi	332.465.675	1.536.183.925
1.5	Beban Hibah	78.181.131.531	67.537.979.259
1.6	Beban Bantuan Sosial	378.353.977	1.526.000.000
1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.465.250.681.042	
1.8	Beban Penyisihan Piutang		
1.9	Beban Lain-lain		
2	BEBAN TRANSFER	548.674.820.164	221.373.186.364
2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	316.773.560.345	3.187.203.870
2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		303.439.105
2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemda Lainnya		90.127.159.993
2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	231.901.259.819	127.755.383.396
2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 MARET 2023
A.3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.873.204.000.431)	2.028.813.326.163
B	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
B.1	SURPLUS NON OPERASIONAL		
1	Surplus penjualan aset non lancar		
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang		
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya		
B.2	DEFISIT NON OPERASIONAL		
1	Defisit penjualan aset non lancar		
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang		
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		
C	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.873.204.000.431)	2.028.813.326.163
D	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		
D.1	PENDAPATAN LUAR BIASA		
D.2	BEBAN LUAR BIASA		
E	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.873.204.000.431)	2.028.813.326.163

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
A	Ekuitas Awal	324.157.280.613.529	315.432.799.474.525
1	Ekuitas Awal Pemerintah Pusat	207.288.859.244.394	202.181.167.672.268
2	Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	116.868.421.369.135	113.251.631.802.257
A.1	Penyesuaian Ekuitas Awal		
B	EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	324.157.280.613.529	315.432.799.474.525
C	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3.510.790.463.425	5.867.305.373.178
C.1	Surplus/Defisit LO	(3.669.453.606.812)	5.773.910.195.014
C.2	KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	6.534.249.789.703	1.323.200.341.351
1	Penyesuaian Nilai Aset		
2	Koreksi SILPA		
3	Koreksi Nilai Persediaan		(3.740.981.867)
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(10.914.960)	863.782.597.133
6	Koreksi atas Reklasifikasi Aset		23.654.902.927
7	Koreksi Lain-lain	6.534.260.704.663	439.503.823.158
C.3	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	645.994.280.533	(1.229.805.163.187)
C.4	REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE		
E	EKUITAS AKHIR	327.668.071.076.954	321.300.104.847.704

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2023
A	EKUITAS AWAL	207.288.859.244.394	202.181.167.672.268
A.1	PENYESUAIAN EKUITAS		
B	EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	207.288.859.244.394	202.181.167.672.268
C	KENAIKAN/PENURUTAN EKUITAS	(104.980.913.281)	2.250.515.806.301
C.1	SURPLUS/DEFISIT LO	(796.249.606.381)	4.207.000.953.035
C.2	KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	45.274.412.567	(726.679.983.547)
1	Penyesuaian Nilai Aset		
2	Koreksi Nilai Persediaan		(3.740.981.867)
3	Selisih Revaluasi Aset		
4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(10.914.960)	863.782.597.133
5	Koreksi atas Reklasifikasi		23.654.902.927
6	Koreksi Lain-lain	45.285.327.527	(1.610.376.501.740)
C.3	TRANSAKSI ATAS ENTITAS	645.994.280.533	(1.229.805.163.187)
C.4	REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS		
1	Uang muka dari KPPN		
E	EKUITAS AKHIR	207.183.878.331.113	204.431.683.478.569

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 MARET 2024	31 DES 2022
A	EKUITAS AWAL	116.868.421.369.135	113.251.631.802.257
B	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.873.204.000.431)	1.566.909.241.979
C	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN- KESALAHAN MENDASAR	6.488.975.377.136	2.049.880.324.898
C.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
C.2	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
C.3	LAIN-LAIN	6.488.975.377.136	2.049.880.324.898
D	EKUITAS AKHIR	120.484.192.745.841	116.868.421.369.135

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		31 MARET 2024	31 MARET 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	15.914.580.277.331	13.537.562.635.619
A11	Pajak	3.674.755.275.531	4.480.984.077.185
A12	Kontribusi Sosial		
A13	Hibah	833.804.435.480	5.276.525.000
A14	Pendapatan Lainnya	11.406.020.566.320	9.051.302.033.434
A2	Beban	7.713.983.101.915	6.954.729.394.343
A21	Kompensasi Pegawai	3.579.040.643.128	3.075.429.608.998
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	2.151.753.903.046	1.618.450.284.343
A23	Konsumsi Aset Tetap		
A24	Bunga	5.092.797.667	11.758.046.798
A25	Subsidi	332.465.675	1.536.183.925
A26	Hibah	1.851.696.012.261	2.079.503.045.337
A27	Manfaat Sosial	1.692.930.977	3.153.844.500
A28	Beban Lainnya	124.374.349.161	164.898.380.442
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	8.200.597.175.416	6.582.833.241.276
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	8.200.597.175.416	6.582.833.241.276
Transaksi Aset Non Keuangan :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	789.730.577.756	483.414.613.890
A311	Aset Tetap	779.514.958.256	478.925.153.900
A312	Perubahan Persediaan		
A313	Barang Berharga		
A314	Aset Non Produksi	10.215.619.500	4.489.459.990
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	7.410.866.597.660	6.099.418.627.386
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	7.403.162.270.513	6.015.886.607.704
A321	Dalam Negeri	7.403.162.270.513	6.015.886.607.704
A322	Luar Negeri		
A323	Monetary gold and SDRs		
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(7.704.327.147)	(83.532.019.682)
A331	Dalam Negeri	(7.704.327.147)	(83.532.019.682)
A332	Luar Negeri		

Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		
--	--	--

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		31 MARET 2024	31 MARET 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	14.275.670.902.162	12.126.554.669.683
A11	Pajak	3.098.130.178.963	3.425.063.247.281
A12	Kontribusi Sosial		
A13	Hibah		
A14	Pendapatan Lainnya	11.177.540.723.199	8.701.491.422.402
A2	Beban	9.788.936.236.658	7.657.396.437.957
A21	Kompensasi Pegawai	1.591.704.741.062	1.122.784.145.310
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	1.526.951.235.277	803.545.169.487
A23	Konsumsi Aset Tetap		
A24	Bunga		
A25	Subsidi		
A26	Hibah	6.656.561.411.422	5.660.139.335.886
A27	Manfaat Sosial	1.314.577.000	1.627.844.500
A28	Beban Lainnya	12.404.271.897	69.299.942.774
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	4.486.734.665.504	4.469.158.231.726
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	4.486.734.665.504	4.469.158.231.726
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	605.784.637.913	319.923.086.100
A311	Aset Tetap	595.569.018.413	315.433.626.110
A312	Perubahan Persediaan		
A313	Barang Berharga		
A314	Aset Non Produksi	10.215.619.500	4.489.459.990
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	3.880.950.027.591	4.149.235.145.626
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	3.880.950.027.591	4.149.235.145.626
A321	Dalam Negeri	3.880.950.027.591	4.149.235.145.626
A322	Luar Negeri		
A323	Monetary gold and SDRs		
A33	Keterjadian Kewajiban Neto		
A331	Dalam Negeri		
A332	Luar Negeri		

Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		
--	--	--

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		31 MARET 2024	31 MARET 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	7.067.938.722.796	5.214.749.241.809
A11	Pajak	576.625.096.568	1.055.920.829.904
A12	Kontribusi Sosial		
A13	Hibah	6.252.987.142.872	3.808.062.824.085
A14	Pendapatan Lainnya	238.326.483.356	350.765.587.820
A2	Beban	3.354.076.212.884	3.101.074.232.259
A21	Kompensasi Pegawai	1.987.335.902.066	1.952.645.463.688
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	624.802.667.769	814.905.114.856
A23	Konsumsi Aset Tetap		
A24	Bunga	5.092.797.667	11.758.046.798
A25	Subsidi	332.465.675	1.536.183.925
A26	Hibah	624.163.948.466	223.104.985.324
A27	Manfaat Sosial	378.353.977	1.526.000.000
A28	Beban Lainnya	111.970.077.264	95.598.437.668
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	3.713.862.509.912	2.113.675.009.550
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	3.713.862.509.912	2.113.675.009.550
Transaksi Aset Non Keuangan :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	183.945.939.843	163.491.527.790
A311	Aset Tetap	183.945.939.843	163.491.527.790
A312	Perubahan Persediaan		
A313	Barang Berharga		
A314	Aset Non Produksi		
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	3.529.916.570.069	1.950.183.481.760
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	3.522.212.242.922	1.866.651.462.078
A321	Dalam Negeri	3.522.212.242.922	1.866.651.462.078
A322	Luar Negeri		
A323	Monetary gold and SDRs		
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(7.704.327.147)	(83.532.019.682)
A331	Dalam Negeri	(7.704.327.147)	(83.532.019.682)
A332	Luar Negeri		

Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		
--	--	--

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 MARET 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 MARET 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	329.418.253.543.879	322.964.618.476.097
61	Aset Non Keuangan	300.634.758.518.762	305.471.518.691.073
611	Aset Tetap	138.320.933.628.594	143.289.570.974.685
6111	Gedung dan Bangunan	121.061.102.744.861	125.355.366.062.114
6112	Peralatan dan Mesin	7.226.134.212.514	8.045.760.800.564
6113	Aset Tetap Lainnya	10.031.454.125.654	9.886.201.566.442
612	Persediaan	3.316.986.441.280	3.185.049.267.501
614	Aset Nonproduksi	158.996.838.448.888	158.996.898.448.888
6141	Tanah	158.966.583.537.975	158.966.583.537.975
6144	Aset Tak Berwujud	30.254.910.913	30.314.910.913
62	Aset Keuangan	33.243.063.706.688	22.478.819.219.802
6202	Uang dan Deposito	14.533.614.743.593	4.553.064.137.895
6203	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.338	343.273.807.338
6204	Pinjaman		
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.061.842.548.375	11.054.173.868.707
6208	Piutang Lainnya	7.304.332.607.382	6.528.307.405.861
621	Aset Keuangan Domestik	33.243.063.706.688	22.478.819.219.802
6212	Uang dan Deposito	14.533.614.743.593	4.553.064.137.895
6213	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.338	343.273.807.338
6214	Pinjaman		
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.061.842.548.375	11.054.173.868.707
6218	Piutang Lainnya	7.304.332.607.382	6.528.307.405.861
622	Aset Keuangan Luar Negeri		
6222	Uang dan Deposito		
6223	Surat Berharga Selain Saham		
6224	Pinjaman		
6225	Saham dan Ekuitas Lain		
6228	Piutang Lainnya		
63	Kewajiban	4.459.568.681.571	4.985.719.434.778
6303	Surat Berharga Utang		
6304	Pinjaman	720.892.203.136	728.596.530.283
6308	Utang Lainnya	3.738.676.478.435	4.257.122.904.495
631	Kewajiban Domestik	4.459.568.681.571	4.985.719.434.778
6313	Surat berharga selain saham		
6314	Pinjaman	720.892.203.136	728.596.530.283

6318	Utang Lainnya	3.738.676.478.435	4.257.122.904.495
632	Kewajiban Luar Negeri		
6323	Surat berharga selain saham		
6324	Pinjaman		
6328	Utang Lainnya		

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 MARET 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 MARET 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	208.256.289.694.206	205.418.426.022.896
61	Aset Non Keuangan	204.611.431.570.670	203.144.126.025.315
611	Aset Tetap	68.496.993.363.165	67.161.564.991.589
6111	Gedung dan Bangunan	63.298.424.836.541	62.488.942.396.166
6112	Peralatan dan Mesin	3.849.308.744.252	3.468.538.964.950
6113	Aset Tetap Lainnya	1.349.259.782.372	1.204.083.630.473
612	Persediaan	2.458.422.103.956	2.326.484.930.177
614	Aset Nonproduksi	133.656.016.103.549	133.656.076.103.549
6141	Tanah	133.625.761.192.636	133.625.761.192.636
6144	Aset Tak Berwujud	30.254.910.913	30.314.910.913
62	Aset Keuangan	5.566.195.726.407	4.714.084.026.512
6202	Uang dan Deposito	2.189.394.157.745	2.113.307.659.371
6203	Surat Berharga Selain Saham	305.900.000.000	305.900.000.000
6204	Pinjaman		
6205	Saham dan Ekuitas Lain		
6208	Piutang Lainnya	3.070.901.568.662	2.294.876.367.141
621	Aset Keuangan Domestik	5.566.195.726.407	4.714.084.026.512
6212	Uang dan Deposito	2.189.394.157.745	2.113.307.659.371
6213	Surat Berharga Selain Saham	305.900.000.000	305.900.000.000
6214	Pinjaman		
6215	Saham dan Ekuitas Lain		
6218	Piutang Lainnya	3.070.901.568.662	2.294.876.367.141
63	Kewajiban	1.921.337.602.871	2.439.784.028.931
6303	Surat Berharga Utang		
6304	Pinjaman		
6308	Utang Lainnya	1.921.337.602.871	2.439.784.028.931
631	Kewajiban Domestik	1.921.337.602.871	2.439.784.028.931
6313	Surat berharga selain saham		
6314	Pinjaman		
6318	Utang Lainnya	1.921.337.602.871	2.439.784.028.931
632	Kewajiban Luar Negeri		
6323	Surat berharga selain saham		
6324	Pinjaman		
6328	Utang Lainnya		

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 MARET 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 MARET 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	121.161.963.849.674	116.716.022.618.629
61	Aset Non Keuangan	96.023.326.948.092	101.428.959.969.095
611	Aset Tetap	69.823.940.265.429	75.227.931.909.608
6111	Gedung dan Bangunan	57.762.677.908.320	62.255.758.383.000
6112	Peralatan dan Mesin	3.376.825.468.262	4.503.390.165.650
6113	Aset Tetap Lainnya	8.682.194.343.282	8.468.783.360.957
612	Persediaan	858.564.337.324	872.453.187.917
614	Aset Nonproduksi	25.340.822.345.339	25.328.574.871.571
6141	Tanah	25.340.822.345.339	25.328.574.871.571
6144	Aset Tak Berwujud		
62	Aset Keuangan	28.127.180.841.564	18.111.720.844.405
6202	Uang dan Deposito	12.344.220.585.848	2.820.896.383.330
6203	Surat Berharga Selain Saham	37.373.807.338	37.373.807.338
6204	Pinjaman		
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.061.842.548.376	11.063.746.358.107
6208	Piutang Lainnya	4.683.743.900.003	4.189.704.295.630
621	Aset Keuangan Domestik	28.127.180.841.564	18.111.720.844.405
6212	Uang dan Deposito	12.344.220.585.848	2.820.896.383.330
6213	Surat Berharga Selain Saham	37.373.807.338	37.373.807.338
6214	Pinjaman		
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.061.842.548.376	11.063.746.358.107
6218	Piutang Lainnya	4.683.743.900.003	4.189.704.295.630
63	Kewajiban	2.988.543.939.983	2.824.658.194.871
6303	Surat Berharga Utang		
6304	Pinjaman	720.892.203.135	961.852.437.355
6308	Utang Lainnya	2.267.651.736.847	1.862.805.757.516
631	Kewajiban Domestik	2.988.543.939.983	2.824.658.194.871
6313	Surat berharga selain saham		
6314	Pinjaman	720.892.203.135	961.852.437.355
6318	Utang Lainnya	2.267.651.736.847	1.862.805.757.516
632	Kewajiban Luar Negeri		
6323	Surat berharga selain saham		
6324	Pinjaman		
6328	Utang Lainnya		



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ANALISIS RASIO

LKPK & LSKP TRIWULAN I 2024
Kanwil DJPb Sumsel





**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2024**

A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah
1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	<p>Rasio solvabilitas jangka pendek pada Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai triwulan I 2024 adalah sebesar 774% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi baik dimana setiap Rp100 kewajiban jangka pendek dijamin dengan Rp774 aset lancar. Rasio solvabilitas jangka pendek periode triwulan I 2024 meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 438%. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan kas lancar yang signifikan meskipun terdapat kenaikan kewajiban jangka pendek</p> <p>Meskipun secara total nilai solvabilitas jangka pendek pemerintah konsolidasian memiliki nilai lebih dari 100%, akan tetapi untuk level Pemerintah Daerah masih terdapat Pemerintah Daerah dengan nilai rasio solvabilitas dibawah 100% yaitu Pemkab Empat Lawang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Pemkab Empat Lawang memiliki kewajiban jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan aset lancar. Kewajiban jangka pendek tersebut yang dominan berupa utang belanja.</p>
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	<p>Rasio solvabilitas jangka panjang Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 19.766% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dalam kondisi baik dimana setiap Rp100 Kewajiban Jangka Panjang dijamin dengan Rp19.766. Kewajiban Jangka Panjang triwulan I tahun 2024 lingkup wilayah Sumatera Selatan terdapat pada Kab. OKU, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. OKU Sekatan, Kab. Ogan Ilir, Kota Palembang dan Lubuk Linggau. Rasio solvabilitas jangka panjang pada periode triwulan I tahun 2024 menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar yang sebesar 55.868% .</p>

2. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 11,45%, menurun dibanding periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 29,97%</p> <p>Secara rata-rata rasio kemandirian keuangan tercatat pada kategori kurang (range 10%-20%) dan jika dilihat per pemda masing-masing, masih banyak pemda lingkup Sumatera Selatan yang kriteria kemandirian keuangan daerah nya masuk dalam kategori sangat kurang (range 0%-10%), yaitu sebanyak dua belas pemda.</p> <p>Di sisi lain, terdapat satu pemda masuk kedalam kategori cukup yaitu Kota Palembang yang rasio kemandirian keuangannya sebesar 36,3,3%. Salah satu penyebabnya adalah PAD pada Kota Palembang bernilai besar, hal ini ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang Kota Palembang. Selain itu, Kota Palembang merupakan pusat aktivitas perekonomian di Sumatera Selatan.</p>
2.	Rasio Solvabilitas Anggaran	<p>Rasio Solvabilitas Anggaran Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada periode triwulan I tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar 193,9% dan 159,7%. Hal tersebut mencerminkan bahwa pendapatan pemerintah daerah mampu menutupi belanja pemerintah sebesar 193,9% selama periode anggaran. Terdapat peningkatan rasio solvabilitas anggaran pada triwulan I tahun 2024 dibanding periode yang sama tahun 2023, hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan pada sisi pendapatan.</p> <p>Rasio Solvabilitas Anggaran pada masing - masing pemerintah daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kisaran diatas 100%. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran. Namun demikian, terdapat 4 pemerintah daerah yang rasio solvabilitas anggarannya dibawah 100% yaitu Kab. Musi Banyuasin 74,4%, Kab Lahat 88,6%, kab. OKU Selatan 90,8% dan Kab. Lubuk Linggau 53,2%. Lebih besarnya belanja pemerintah daerah dibanding pendapatan merupakan penyebab dari hal tersebut. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi-potensi peningkatan PAD guna menopang belanja.</p>
3.	Rasio Solvabilitas Layanan	<p>Rasio Solvabilitas Layanan Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2024 menunjukkan angka Rp14.262.750 yang berarti bahwa untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis pelayanan yang akan diterima oleh per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dipenuhi /dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp14.262.750 atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menyediakan fasilitas atau proses pelayanan publik yang setara dengan nilai aset pemda sebesar Rp14.262.750 untuk setiap penduduk yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.</p>

4.	Rasio Solvabilitas Operasional	<p>Rasio Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 69,56% dan 467,59% Hal tersebut mencerminkan bahwa pada periode triwulan I tahun 2024, pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum cukup untuk menutupi belanja operasional, Pemda lingkup Sumsel perlu mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar belanja-belanja operasional dapat tercukupi. Terdapat penurunan rasio solvabilitas operasional pada triwulan I tahun 2024 dibanding 2023, yang disebabkan penurunan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer serta diikuti dengan meningkatnya beban operasi. Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p> <p>Di sisi lain, terdapat 1 pemkab/kota di wilayah Sumatera Selatan yang nilai Solvabilitas Operasional nya berada pada kisaran diatas 100%, yaitu Pemprov. Sumatera Selatan, sebesar 158,8%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemprov. Sumatera Selatan berada dalam kemampuan yang baik dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.</p>
5.	Rasio Fleksibilitas Keuangan	<p>Rasio Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar minus 30,50% dan 62,96%. Hal ini mencerminkan bahwa pada triwulan I tahun 2024 pendapatan yang dikumpulkan, setelah dikurangi DAK, belum cukup atau kurang untuk membiayai kebutuhan utama yaitu pembayaran beban operasional dan pembayaran pokok utang. Rasio fleksibilitas keuangan triwulan I tahun 2024 turun dibanding dengan tahun 2023. Terdapat penurunan pendapatan dan peningkatan belanja. Pemda lingkup Sumsel perlu untuk memfokuskan pada optimalisasi PAD agar kesinambungan fiskal terjaga utamanya dalam menghadapi risiko peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan beban maupun peningkatan kapasitas utang. Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p> <p>Meskipun secara rata-rata rasio fleksibilitas keuangan pemda lingkup Prov. Sumsel minus, namun demikian, terdapat satu Pemda yang rasio fleksibilitas keuangannya 58,79% yaitu Pemprov. Sumatera Selatan, hal ini disebabkan karena pendapatan operasional yang melebihi beban operasional yang berarti Pemprov. Sumatera Selatan masih mampu dalam membiayai kebutuhan utama yaitu pembayaran beban operasional.</p>

B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Keseimbangan Operasi Neto (Net Operating Balance)	Perubahan kekayaan selama transaksi berjalan menunjukkan nilai positif di seluruh tingkatan pemerintahan dengan akumulasi sebesar Rp8.200.597.175.416. Dengan demikian, nilai Keseimbangan Operasi Neto periode triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.617.763.934.140 atau

		<p>24,58% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6.582.833.241.276.</p> <p>Kenaikan Keseimbangan Operasi Netto tersebut terjadi khususnya pada level pemerintah pusat dan kab/kota. Hal ini disebabkan karena meskipun terdapat peningkatan beban, namun diiringi juga dengan peningkatan pendapatan.</p> <p>Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan yang telah dilakukan eliminasi dengan transaksi resipokal.</p>
2.	Keseimbangan Operasi Bruto (Gross Operating Balance)	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Bruto pada LO Statistik periode triwulan I tahun 2024 sama dengan nilai Keseimbangan Operasi Netto. Seharusnya, nilai NOB mencakup semua beban, sedangkan nilai GOB tidak memperhitungkan Konsumsi Aset Tetap. Namun, saat ini komponen pembentuk Laporan Operasional Statistik adalah Laporan Realisasi Anggaran sehingga tidak mencatat konsumsi aset tetap.</p>
3.	Peminjaman/Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing)	<p>Nilai <i>Net Lending</i> tahun periode triwulan I 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp7.410.866.597.660. Nilai <i>Net Lending</i> mengalami peningkatan sebesar Rp1.311.447.970.274 atau 21,5% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6.099.418.627.386. Peningkatan signifikan <i>Net Lending</i> triwulan I tahun 2024 terjadi pada level pemerintah kab/kota, sedangkan pada pemerintah pusat dan provinsi mengalami penurunan.</p> <p><i>Net Lending/(Net Borrowing)</i> tersebut pada seluruh tingkatan pemerintahan dilakukan optimalisasi melalui pembiayaan yaitu melalui Akuisisi Aset Keuangan Neto sebesar Rp7.403.162.270.513 Keterjadian Kewajiban Neto sebesar minus Rp7.704.327.147.</p>
4.	Keseimbangan Operasi Primer (Primary Operating Balance)	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Primer triwulan I tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp8.200.597.175.416. Nilai positif terjadi pada seluruh tingkatan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mampu membiayai seluruh beban operasi sehingga kesinambungan fiskal akan selalu terjaga.</p>
5.	Keseimbangan Primer (Primary Balance)	<p>Nilai Keseimbangan Primer triwulan I tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp2.062.020.276.002. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mampu membiayai seluruh pengeluaran dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas <i>interest expense</i> tanpa menimbulkan utang yang baru sehingga kesinambungan fiskal akan selalu terjaga.</p>

2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi lainnya

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Pajak Langsung (Direct Taxes)	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.548.501.882.283 Pajak Langsung sebagian besar berupa Taxes on income, profits, and capital gain atau Pajak Penghasilan yang pemungutannya merupakan kewenangan pada Pemerintah Pusat. Pajak Penghasilan didominasi oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan. Pajak Langsung Lainnya berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp41.678.532.254 atau 2,77% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.506.823.350.029. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari kenaikan pendapatan PPh 21 dan PPh Badan.
2.	Pajak Tidak Langsung (Indirect Taxes)	Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.086.505.471.393. Pajak Tidak Langsung mengalami penurunan yaitu sebesar Rp809.765.128.40 atau minus 27,96% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2.896.270.599.799. Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) sebagian besar berupa Taxes on Good Services, Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Pusat didominasi oleh PPN Dalam Negeri, Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. Capaian pajak tersebut yang tumbuh positif menunjukkan adanya sinyal positif pemulihan konsumsi masyarakat.
3.	Pajak Modal (Capital Taxes)	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp39747921855 yang mengalami penurunan sebesar Rp38.142.205.502 atau minus 48,97% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp77.890.127.357. Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) hanya terdapat pada Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kenaikan Pajak Modal (<i>Capital taxes</i>) tersebut mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan.
4.	Belanja Konsumsi Final Pemerintah (Government Final Consumption Expenditure)	Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp5.855.168.895.335, mengalami kenaikan sebesar Rp1.750.158.828.616 atau 42,63% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp4.105.010.066.719. Apabila melihat komponen pembentuk Belanja Konsumsi Final Pemerintah, telah terjadi kenaikan pada komponen <i>Compensation of Employee</i> dan <i>Use of Goods and Service</i> dan <i>Miscellaneous Other Expense</i> dan <i>Sales of Goods and Services</i> .
5.	Tabungan Bruto (Gross Saving)	Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>) pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp8.171.619.406.078 yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.653.357.062.242 atau 25,36% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar

		<p>Rp6.518.262.343.836. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan sisa Tabungan Bruto yang dapat dialokasikan untuk dilakukan investasi melalui optimalisasi pembiayaan.</p> <p>Peningkatan Tabungan Bruto terjadi pada level pemerintah kab/kota.</p>
--	--	--

3. Analisis Indikator Pembiayaan

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Total Pembiayaan (Total Financing)	<p>Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) merupakan nilai yang sama dengan <i>Net Lending/ Net Borrowing</i> (selisih antara akuisisi aset keuangan neto dengan keterjadian kewajiban neto). Nilai <i>Net Lending</i> periode triwulan I tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp7.410.866.597.660. Dengan demikian, nilai <i>net Lending</i> mengalami penurunan sebesar Rp1.311.447.970.274 atau 21,5% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6.099.418.627.386. <i>Net Lending</i> tahun triwulan I 2024 terjadi pada semua level tingkat pemerintahan</p> <p><i>Net Lending/Net Borrowing</i> tersebut pada seluruh tingkatan pemerintahan dilakukan optimalisasi melalui pembiayaan yaitu melalui Akuisisi Aset Keuangan Neto dan Keterjadian Kewajiban Neto</p>
2.	Pembiayaan Dalam Negeri (Domestic Financing)	<p>Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) merupakan bentuk dari upaya optimaslisasi <i>Net Lending (Net Borrowing)</i>. Pada triwulan I tahun 2024, Net Lending sebesar Rp7.410.866.597.660 merupakan Transaksi Aset Keuangan dengan unit institusi residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi residen yang seluruhnya bersumber dari debitur/kreditur dalam negeri.</p>
3.	Pembiayaan Luar Negeri (Foreign Financing)	<p>Seluruh pembiayaan yang terjadi pada wilayah Sumatera Selatan merupakan Pembiayaan yang bersumber dari dalam Negeri. Pembiayaan melalui luar negeri hanya dilakukan pada level BA-BUN kemudian akan diterus pinjamkan kepada Pemerintah Daerah.</p>

4. Analisis Indikator Kekayaan Utang

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Utang Bruto (Gross Debt)	<p>Jumlah Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) pada wilayah Sumatera Selatan adalah sebesar Rp4.459.568.681.571. Utang tersebut terdapat pada seluruh tingkatan pemerintahan dan sebagian besar berupa kewajiban jangka pendek</p>
2.	Utang Netto (Net Debt)	<p>Nilai Utang Netto (<i>Net Debt</i>) pada wilayah Sumatera Selatan sama dengan nilai Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>), karena pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki aset berupa <i>Monetary Gold & Special Drawings</i>. LSKP yang disusun pada</p>

	level wilayah Sumatera Selatan saat ini hanya mencakup lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tidak termasuk korporasi. Sebagai informasi tambahan bahwa <i>Monetary Gold</i> merupakan emas yang dimiliki dan disimpan sebagai aset cadangan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia), sedangkan <i>Special Drawings</i> merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasikan kepada negara anggotanya untuk melengkapi aset cadangan.
--	--

C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Uraian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2023
Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	774%	438%
Aset Lancar	21.503.264.881.912	12.342.581.389.052
Kewajiban Jangka Pendek	2.779.258.261.272	2.817.091.478.256
Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	19.766%	55.868%
Total Aset	332.127.639.759.892	303.645.108.804.775
Kewajiban Jangka Panjang	1.680.310.420.299	543.506.451.290

b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2024

No	Pemerintah Prov/Kan/Kota	Rasio									
		Kemandirian Keuangan Daerah		Solvabilitas Anggaran		Solvabilitas Layanan		Solvabilitas Operasional		Fleksibilitas Keuangan	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	Prov. Sumatera Selatan	13,5%	62,9%	339,6%	209,7%	4.150.573	4.092.608	158,8%	205,3%	58,8%	96,5%
2	Kab. Musi Banyuasin	0,5%	11,6%	74,4%	182,9%	11.297.011	10.399.016	22,3%	193,1%	-77,7%	72,7%
3	Kab. Ogan Komering Ulu	6,2%	13,8%	253,4%	218,1%	8.236.123	8.731.029	89,0%	214,1%	-11,0%	114,1%
4	Kab. Muara Enim	13,5%	9,1%	209,9%	125,1%	13.549.282	11.636.972	52,2%	154,1%	-47,8%	54,1%
5	Kab. Lahat	4,0%	9,6%	88,6%	152,8%	9.168.763	7.209.327	48,3%	175,0%	-51,7%	75,0%
6	Kab. Musi Rawas	2,0%	5,4%	243,8%	216,8%	9.902.358	9.537.878	44,8%	220,2%	-55,2%	120,2%
7	Kab. Ogan Komering Ilir	13,7%	10,4%	183,9%	126,4%	6.045.311	5.111.849	47,5%	156,2%	-52,5%	56,2%
8	Kab. Banyuasin	4,8%	19,9%	138,1%	109,1%	5.667.949	5.324.188	47,7%	114,5%	-52,3%	14,5%
9	Kab. OKU Timur	2,2%	6,8%	177,9%	159,3%	15.929.282	4.761.779	70,1%	178,5%	-29,9%	78,5%
10	Kab. OKU Selatan	6,4%	2,8%	90,8%	96,0%	7.578.402	8.393.573	45,7%	101,8%	-54,3%	-12,3%
11	Kab. Ogan Ilir	10,7%	17,5%	177,0%	139,5%	6.499.225	5.785.982	42,2%	136,8%	-57,8%	36,8%
12	Kab. Empat Lawang	1,0%	0,3%	170,1%	161,8%	7.235.596	9.699.988	55,5%	158,2%	-44,5%	58,2%
13	Kab. Pali	7,1%	2,3%	183,3%	31,2%	20.141.954	16.344.735	47,1%	37,4%	-52,9%	-62,6%

14	Kab. Musi Rawas Utara	4,7%	2,4%	344,2%	181,2%	13.869.584	10.966.804	73,7%	175,1%	-26,3%	75,1%
15	Kota Palembang	36,3%	47,1%	148,0%	166,8%	10.166.570	9.985.131	69,4%	162,2%	-31,4%	62,2%
16	Kota Prabumulih	16,5%	19,1%	244,0%	134,6%	12.235.304	12.476.903	51,7%	132,3%	-48,3%	32,3%
17	Kota Pagaralam	1,6%	9,4%	255,3%	217,7%	16.791.297	16.332.413	45,3%	213,5%	-54,7%	113,5%
18	Kota Lubuk Linggau	2,9%	6,0%	53,2%	107,0%	13.628.160	13.370.670	20,2%	105,0%	-79,8%	-0,8%
		11,45%	26,97%	193,9%	159,7%	14.262.750	12.787.133	69,56%	167,59%	-30,50%	62,96%

2. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Keseimbangan Fiskal

Analisis Keseimbangan Fiskal Triwulan I Tahun 2024 (dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer (NOB+Interest Expense)	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	4.486,73	4.486,73	3.880,95	4.486,73	3.880,95
2	Pemerintah Kab/Kot	1.344,90	1.344,90	1.190,59	1.348,74	1.194,42
3	Pemerintah Provinsi	2.368,96	2.368,96	2.339,33	2.370,22	2.340,59
4	Pemerintah Umum	8.200,60	8.200,60	7.410,87	8.205,69	2.062,02

Analisis Keseimbangan Fiskal Triwulan I Tahun 2023 (dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer (NOB+Interest Expense)	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	4.469,16	4.469,16	4.149,24	4.469,16	4.149,24
2	Pemerintah Kab/Kot	1.364,62	1.364,62	1.216,40	1.373,64	1.225,42
3	Pemerintah Provinsi	749,05	749,05	733,78	751,79	736,52
4	Pemerintah Umum	6.582,83	6.582,83	6.099,42	6.594,59	6.111,18

b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya Triwulan I Tahun 2024 (dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Perintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	1.539,38	1.558,75	0,00	3.131,06	4.497,50
2	Pemerintah Kab/Kota	9,13	189,06	39,75	2.284,75	1.305,16
3	Pemerintah Provinsi	0,00	338,69	0,00	439,36	2.368,96
4	Pemerintah Umum	1.548,50	2.086,51	39,75	5.855,17	8.171,62

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya Triwulan I Tahun 2023
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Perintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	1.490,54	1.934,52	0,00	1.333,59	4.482,48
2	Pemerintah Kab/Kota	16,28	246,35	77,89	2.180,70	1.286,73
3	Pemerintah Provinsi	0,00	715,40	0,00	590,73	749,05
4	Pemerintah Umum	1.506,82	2.896,27	77,89	4.105,01	6.518,26

c. Analisis Indikator Pembiayaan

Analisis Indikator Pembiayaan Triwulan I Tahun 2024
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	3.880,95	3.880,95	0,00	0,00	0,00
2	Pemerintah Kab/Kota	1.190,59	1.190,59	0,00	0,00	0,00
3	Pemerintah Provinsi	2.339,33	2.339,33	0,00	0,00	0,00
4	Pemerintah Umum	7.410,87	7.410,87	0,00	0,00	0,00

Analisis Indikator Pembiayaan Triwulan I Tahun 2023
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	4.149,24	4.149,24	0,00	0,00	0,00
2	Pemerintah Kab/Kota	1.216,40	1.216,40	0,00	0,00	0,00
3	Pemerintah Provinsi	733,78	733,78	0,00	0,00	0,00
4	Pemerintah Umum	6.099,42	6.099,42	0,00	0,00	0,00

Analisis Indikator Kekayaan Utang

Analisis Indikator Kekayaan Utang Triwulan I Tahun 2024
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	1.921,34	1.921,34
2	Pemerintah Kab/Kota	2.055,79	2.055,79
3	Pemerintah Provinsi	932,76	932,76
4	Pemerintah Umum	4.459,57	4.459,57

Analisis Indikator Kekayaan Utang Triwulan I Tahun 2023
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	684,90	684,90
2	Pemerintah Kab/Kota	1.763,00	1.763,00
3	Pemerintah Provinsi	1.280,88	1.280,88
4	Pemerintah Umum	3.360,60	3.360,60

***Catatan:**

Angka pada Neraca dan LO Pemda merupakan angka estimasi yang didapat dari data olah LRA triwulan I 2024 dengan memperhitungkan angka Neraca *unaudited* tahun 2023 menggunakan kertas kerja neraca LO estimasi triwulan I 2024

Palembang, 30 April 2024
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

META DATA

LKPK & LSKP TRIWULAN I 2024
Kanwil DJPb Sumsel



META DATA

INFORMASI DASAR	
1. Nama Data	: LKPK & LSKP Tingkat Wilayah Triwulan I Tahun 2024
2. Penyelenggara	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Statistik Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat	: Gedung Keuangan Negara LT.2 JL. Kapten A. Rivai No. 2-4
4. Nomor Telepon	: 0711-351476
5. Nomor Faksimili	: 0711-310891
6. Email	: Kanwildjpbnsumsel@kemenkeu.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan laporan keuangan penggabungan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Satuan Kerja (UAKPA) Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama satu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan.</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah yang disusun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian dari seluruh UAKPA lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dengan UAKKBUN Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi LRA, LO, Neraca dan LPE;2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian LKPD seluruh pemerintah daerah lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi LRA, LO Estimasi, Neraca Estimasi dan LPE Estimasi;3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian LKPP-TW dan LKPDK-TW yang meliputi LRA, LO Estimasi,	

Neraca Estimasi dan LPE Estimasi.

4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang disusun meliputi LSKP-LO dan LSKP-Neraca. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) merupakan hasil mapping akun GFS berdasarkan LKPP-TW dan LKPKD-TW

CAKUPAN DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian, Laporan Operasional Estimasi dan Neraca Estimasi Pemerintah Daerah Konsolidasian, dan LPE Estimasi
2. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca Pemerintah Pusat dan LPE Pemerintah Pusat yang didapat dari SIKRI Modul Pelaporan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian merupakan hasil konsolidasian antara LKPP-TW dengan LKPKD-TW
4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan mapping ke akun GFS dari laporan LKPP-TW dan LKPKD-TW

PERIODESASI PUBLIKASI

Triwulan I Tahun 2024

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

Laporan GFS Triwulan I Tahun 2024 selambat-lambatnya tanggal 30 April 2024

JADWAL PUBLIKASI KE DEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)

Satu bulan sebelum publikasi berikutnya diterbitkan

SUMBER DATA

Data keuangan pemerintah daerah berupa data realisasi anggaran 18 Kab/Kota lingkup Kanwil DJPb Sumsel diunduh dari tautan <https://linktr.ee/gfskanwil>. Data keuangan pemerintah daerah tersebut kemudian diolah dengan menggunakan kertas kerja *excel* LRA LKPKD. Data laporan operasional, data neraca pemerintah daerah dan data LPE pemerintah daerah konsolidasian merupakan data estimasi yang didapat dari data data realisasi anggaran pemda yang kemudian diolah dengan menggunakan kertas kerja *excel* estimasi neraca LPE dan LO LKPKD. Selanjutnya dilakukan pengunggahan data LKPKD ke aplikasi SIKRI Modul Pelaporan. Data LKPP tersedia langsung pada aplikasi SIKRI Modul Pelaporan.

Atas data LKPKD dan LKPP tersebut dilakukan proses konsolidasian dan eliminasi akun-akun resiprokal dengan menggunakan aplikasi SIKRI Modul Pelaporan

METODOLOGI

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran II PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan (3) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yang disusun berdasarkan pendekatan *high level mapping*, terdiri dari Laporan Operasional yang di-*mapping* menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian dan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan **data given yang tersedia pada aplikasi SIKRI** modul Pelaporan yang telah terekonsiliasi dari seluruh satuan kerja (UAKPA) yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. **Terdapat angka minus sebesar Rp13.307.500.153 Laporan Operasional Pemerintah Pusat khususnya pada akun Pendapatan Hibah yang juga menyebabkan angka minus pada LO Konsolidasian Pemda dan Pempus pada akun Pendapatan Hibah sebesar Rp13.266.180.239.**
2. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 18 Kab/kota diunduh dari tautan

<https://linktr.ee/gfskanwil>. Data Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan untuk data Laporan Operasional (LO), Neraca dan LPE merupakan data estimasi yang didapat dari proses *mapping* data realisasi anggaran dengan menggunakan kerta kerja *excel* estimasi neraca LO. Atas data Pemerintah Daerah tersebut dilakukan proses konsolidasi dan diunggah ke aplikasi SIKRI Modul Pelaporan.

3. Proses konsolidasi LKPKD dan LKPP dilakukan secara sistem melalui aplikasi SIKRI Modul Pelaporan dengan melakukan jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi akun-aku resiprokal.

4. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Gedung Keuangan Negara LT.2 JL. Kapten A. Rivai No. 2-4